

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. LANDASAN TEORI

1. Pengertian dan Konsep Dasar Koperasi

a. Pengertian koperasi

Undang-Undang Dasar 1945 dalam bidang ekonomi pasal 33 ayat 1 menyatakan bahwa “perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan”. Dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa usaha yang sesuai dengan pasal tersebut adalah koperasi.

Hal ini mengandung makna bahwa koperasi sebagai badan usaha memiliki perbedaan dengan badan usaha lainnya yang jika dilihat dari makna tujuan usaha yang terkandung. Koperasi menekankan bahwa terdapat kesamaan kepentingan dan hak para anggota koperasi.

Menurut Rudianto (2010 : 3) menyatakan bahwa : “ secara umum koperasi dipahami sebagai perkumpulan orang yang secara sukarela mempersatukan diri untuk memperjuangkan peningkatan kesejahteraan ekonomi mereka, melalui pembentukan sebuah badan usaha yang dikelola secara demokratis”. Sedangkan menurut Sudarwanto (2013 : 19) menyatakan bahwa : “ Suatu perkumpulan orang yang secara sukarela berjuang bersama untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka melalui pembentukan suatu badan usaha yang dikelola secara demokratis”.

b. Tujuan koperasi

Dalam pasal 3 UU No 25/1992 disebutkan bahwa koperasi di Indonesia sebagai suatu alat untuk membangun sistem perekonomian.

Menurut Sudarwanto (2013 : 20) menjelaskan bahwa koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945.

Menurut Rudianto (2010 : 4), berdasarkan tujuan yang ditetapkan dalam UU No. 25 Tahun 1992 Pasal 3, dapat dikatakan bahwa tujuan utama koperasi di Indonesia meliputi tiga hal berikut :

- 1) Untuk memajukan kesejahteraan anggota.
- 2) Untuk memajukan kesejahteraan masyarakat.
- 3) Turut serta membangun tatanan perekonomian nasional.

Memaknai pemahaman amanat yang tertuang dalam UUD 1945 tersebut, bahwa koperasi menjadi suatu model sistem perekonomian negara yang harus diwujudkan dan diimplementasikan dalam aktivitas kegiatan ekonomi bangsa Indonesia, mengingat koperasi ditempatkan sebagai *soko gurunya* perekonomian nasional. (Sudarwanto (2013 : 21)

c. Prinsip koperasi

Menurut Sudarwanto (2013 : 21) prinsip koperasi adalah sebagai berikut :

1) Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka

Prinsip ini menegaskan bahwa tidak boleh ada pemaksaan oleh pihak manapun untuk menjadi anggota koperasi.

2) Pengelolaan dilakukan secara demokratis

Prinsip ini menegaskan bahwa dalam pengambilan keputusan senantiasa melibatkan anggota koperasi. Pengaturannya diatur dalam anggaran dasar atau rumah tangga koperasi.

3) Pembagian sisa hasil usaha sebanding dengan partisipasi anggota

Pembagian sisa hasil usaha sebanding dengan partisipasi anggota koperasi dalam membentuk kontribusi sisa hasil usaha selama periode akuntansi. Dengan demikian pendapatan anggota koperasi dari pembagian sisa hasil usaha sangat tergantung dari partisipasi anggota dalam memberikan kontribusi pembentukan sisa hasil usaha bagi koperasi.

4) Pemberian jasa atas modal

Pemberian balas jasa yang terbatas atas modal merupakan cermin atas kewajiban pemberian imbalan bagi partisipasi anggota koperasi serta mendorong makin kuatnya kesetiakawanan antar sesama anggota koperasi.

5) Kemandirian

Prinsip kemandirian menunjukkan bahwa pengelolaan usaha dijalankan dan diawasi oleh anggota harus dapat memberikan peningkatan kesejahteraan bagi anggotanya dan masyarakat.

d. Jenis-jenis koperasi

Menurut Muljono (2012 : 4) Jenis koperasi berdasarkan kegiatan usaha koperasi. Berdasarkan kegiatan usaha secara umum, koperasi dapat dikelompokkan menjadi :

- 1) Koperasi Konsumen. Koperasi konsumen adalah koperasi yang usahanya memenuhi kebutuhan sehari hari anggota koperasi.
- 2) Koperasi Produsen. Koperasi produsen adalah koperasi yang anggotanya menghasilkan produk yang kemudian dijual atau dipasarkan melalui koperasi.
- 3) Koperasi Simpan pinjam. Koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang melayani kegiatan peminjaman dan penyimpanan uang para anggota.

Menurut Muljono (2012 : 4) Jenis koperasi berdasarkan latar belakang anggota. Berdasarkan latar belakang anggota, koperasi dapat dikelompokkan menjadi :

- 1) Koperasi Unit Desa (KUD), yaitu koperasi yang beranggotakan masyarakat pedesaan dan melayani kebutuhan mereka, terutama kebutuhan dibidang pertanian.
- 2) Koperasi Pasar, yaitu koperasi yang beranggotakan siswa sekolah, karyawan sekolah, dan guru.

3) Koperasi Pegawai Negeri, yaitu koperasi yang beranggotakan pegawai negeri.

Menurut Muljono (2012 : 4) Jenis koperasi berdasarkan kondisi anggotanya. Berdasarkan kondisi anggotanya, koperasi secara umum dapat dikelompokkan menjadi :

- 1) Koperasi Primer. Koperasi primer adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang-seorang. Koperasi primer dibentuk oleh sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) orang.
- 2) Koperasi Sekunder. Koperasi sekunder adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan koperasi. Koperasi sekunder dibentuk oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang.

e. Modal pokok koperasi

Menurut Sugiyarso (2011 : 49) dalam praktik nyata koperasi di masyarakat, menyebutkan dalam Anggaran Rumah Tangganya bahwa modal perusahaan koperasi berasal dari anggota, yang berupa:

- 1) Simpanan pokok
- 2) Simpanan wajib
- 3) Simpanan sukarela
- 4) Simpanan pemupukan modal
- 5) Simpanan lain yang dianggap perlu

2. Penyusunan Laporan Keuangan

a. Pengertian laporan keuangan

Ikatan Akuntansi Indonesia (2012 : 5) menyatakan bahwa pengertian laporan keuangan merupakan struktur yang menyajikan posisi keuangan dan kinerja keuangan dalam sebuah entitas. Tujuan umum dari laporan keuangan ini untuk kepentingan umum adalah penyajian informasi mengenai posisi keuangan (*financial position*), kinerja keuangan (*financial performance*), dan arus kas (*cash flow*) dari entitas yang sangat berguna untuk membuat keputusan ekonomis bagi para penggunanya. Untuk dapat mencapai tujuan ini, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai elemen dari entitas yang terdiri dari aset, kewajiban, beban, dan pendapatan, perubahan ekuitas dan arus kas. Informasi tersebut diakui dengan catatan, akan membantu pengguna memprediksi arus kas masa depan.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan adalah proses akuntansi yang digunakan sebagai media untuk berkomunikasi tentang informasi antara data keuangan atau aktivitas suatu perusahaan kepada pemakainya sebagai salah satu bahan dalam pengambilan keputusan. Selain itu laporan keuangan juga berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban pihak manajemen.

b. Tujuan laporan keuangan

Pada dasarnya tujuan laporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang digunakan sebagai sarana pengambilan keputusan oleh pemakainya.

Menurut Sudarwanto (2013 : 8) menjelaskan bahwa secara umum laporan keuangan disusun dengan tujuan :

- 1) Memberikan informasi keuangan yang dapat dipercaya mengenai sumber-sumber ekonomi dan kewajiban maupun modal suatu koperasi.
- 2) Memberikan informasi yang dapat dipercaya mengenai perubahan atas sumber-sumber ekonomi dan kewajiban maupun modal karena adanya aktivitas usaha dalam rangka memperoleh Sisa Hasil Usaha suatu koperasi.
- 3) Membantu para pemakai informasi keuangan dalam rangka mengestimasi potensi koperasi dalam menghasilkan Sisa Hasil Usaha dimasa yang akan datang.
- 4) Mengungkapkan informasi lainnya yang berhubungan dengan laporan keuangan yang relevan seperti informasi tentang kebijakan akuntansi yang dianut oleh koperasi.

c. Karakteristik laporan keuangan

Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (2009 : 5-8), laporan keuangan yang berguna bagi pemakai informasi bahwa harus terdapat empat karakteristik kualitatif pokok yaitu dapat dipahami, relevan, keandalan, dan dapat diperbandingkan.

1) Dapat dipahami

Kualitas penting informasi yang ditampung dalam laporan keuangan adalah kemudahannya untuk dapat segera dipahami oleh pemakai. Untuk maksud ini, pemakai diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktivitas ekonomi dan bisnis, akuntansi, serta keamauan untuk mempelajari informasi dengan ketekunan yang wajar. Namun demikian, informasi kompleks yang seharusnya dimasukkan dalam laporan keuangan tidak dapat dikeluarkan hanya atas dasar pertimbangan bahwa informasi tersebut terlalu sulit untuk dapat dipahami oleh pemakai tertentu.

2) Relevan

Informasi harus relevan untuk memenuhi kebutuhan pemakai dalam proses pengambilan keputusan. Informasi memiliki kualitas relevan kalau dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini atau masa depan, menegaskan, atau mengoreksi hasil evaluasi mereka dimasa lalu. Peran informasi dalam peramalan (*predictive*) dan penegasan (*confirmatory*) berkaitan satu sama lain. Misalnya informasi

struktur dan besarnya aset yang dimiliki bermanfaat bagi pemakai ketika mereka berusaha meramalkan kemampuan perusahaan dalam memanfaatkan peluang dan bereaksi terhadap situasi yang merugikan, informasi yang sama juga berperan dalam memberikan penegasan (*confirmatory role*) terhadap prediksi yang lalu, misalnya tentang bagaimana struktur keuangan perusahaan diharapkan tersusun atau tentang hasil dari operasi yang direncanakan. Informasi posisi keuangan dan kinerja dimasa lalu seringkali digunakan sebagai dasar untuk memprediksi posisi keuangan dan kinerja masa depan dan hal-hal lain yang langsung menarik perhatian pemakai, seperti pembayaran dividen dan upah, pergerakan harga sekuritas dan kemampuan perusahaan untuk memenuhi komitmennya ketika jatuh tempo. Untuk memiliki nilai prediktif, informasi tidak perlu harus dalam bentuk ramalan eksplisit. Namun demikian, kemampuan laporan keuangan untuk membuat prediksi dapat ditingkatkan dengan penampilan informasi tentang transaksi dan peristiwa masa lalu. Misalnya nilai prediktif laporan laba-rugi dapat ditingkatkan kalau akun-akun penghasilan atau badan yang tidak biasa, abnormal dan jarang terjadi diungkapkan secara terpisah.

3) Keandalan

Informasi juga harus andal (*reliable*). Informasi memiliki kualitas andal jika bebas dari pengertian yang menyesatkan, material dan dapat diandalkan pemakainnya sebagai penyajian yang tulus atau jujur dari yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar diharapkan dapat

disajikan. Informasi mungkin relevan tetapi jika hakekat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Misalnya jika tindakan hukum masih dipersengketakan, mungkin tidak tepat bagi perusahaan untuk mengakui jumlah seluruh tuntutan tersebut dalam neraca, meskipun mungkin tepat untuk mengungkapkan jumlah serta keadaan dari tuntutan tersebut.

4) Dapat diperbandingkan

Pemakai harus dapat membandingkan laporan keuangan perusahaan antara periode untuk mengidentifikasi kecenderungan posisi dan kinerja keuangan. Pemakai juga harus dapat memperbandingkan laporan keuangan antara perusahaan untuk mengevaluasi posisi keuangan secara relatif. Oleh karena itu, pengukuran dan penyajian dampak keuangan, transaksi, dan peristiwa lain yang serupa harus dilakukan secara konsisten untuk perusahaan bersangkutan, antar periode perusahaan yang sama dan untuk perusahaan yang berbeda.

3. STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN ENTITAS TANPA AKUNTABILITAS PUBLIK (SAK-ETAP)

a. Pengertian Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) menyatakan entitas tanpa akuntabilitas publik (ETAP) adalah suatu entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan dan menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purpose financial statement*) bagi pengguna eksternal. Contoh pengguna eksternal adalah pemilik yang tidak terlibat langsung dalam pengelolaan usaha, kreditur, dan lembaga pemeringkat kredit.

SAK ETAP membantu perusahaan kecil menengah dalam menyediakan pelaporan keuangan yang tetap relevan dan andal. SAK ETAP akan khusus digunakan untuk perusahaan tanpa akuntabilitas publik yang signifikan. Perusahaan yang terdaftar dalam bursa efek dan yang memiliki akuntabilitas publik signifikan tetap harus menggunakan PSAK yang umum.

b. Tujuan Penyusunan SAK ETAP

Perusahaan dapat menggunakan SAK ETAP dikarenakan :

- 1) PSAK – IFRS based sulit diterapkan bagi perusahaan kecil menengah mengingat penentuan *fair value* memerlukan biaya tidak sedikit.
- 2) PSAK – IFRS rumit dalam implementasinya.
- 3) PSAK –IFRS menggunakan *principle based* sehingga membutuhkan banyak *profesional judgement*.
- 4) PSAK – IFRS perlu dokumentasi dan IT yang kuat.

Oleh karena itu SAK ETAP digunakan oleh perusahaan kecil menengah sebagai standar akuntansi keuangan perusahaan yang mereka kelola.

c. Kriteria SAK ETAP

Pada intinya, SAK ETAP adalah PSAK yang disederhanakan:

- 1) Relevan
- 2) Merupakan pilihan alternatif standar akuntansi yang sederhana
- 3) Penyederhanaan pengakuan dan pengukuran
- 4) Mengurangi tingkat pengungkapan
- 5) Penyederhanaan proses penyusunan

Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik adalah entitas yang memiliki dua kriteria yang menentukan apakah suatu entitas tergolong entitas tanpa akuntabilitas publik (ETAP) yaitu:

- 1) Tidak memiliki akuntabilitas publik yang signifikan.

Suatu entitas dikatakan memiliki akuntabilitas yang signifikan jika:

- a) Entitas telah mengajukan pernyataan pendaftaran atau entitas dalam proses pengajuan pernyataan pendaftaran pada otoritas pasar modal (BAPEPAM-LK) atau regulator lain untuk tujuan penerbitan efek di pasar modal. Oleh sebab itu Bapepam sendiri telah mengeluarkan surat edaran (SE) Bapepam-LK No. SE-06/BL/2010 tentang larangan penggunaan SAK ETAP bagi lembaga pasar modal, termasuk emiten, perusahaan publik, manajer investasi, sekuritas, asuransi, reksa dana, dan kontrak investasi kolektif.

- b) Entitas menguasai aset dalam kapasitas sebagai fidusia untuk sekelompok besar masyarakat, seperti bank, entitas asuransi, pialang dan/atau pedagang efek, dana pensiun, reksa dana, dan bank investasi.
2. Tidak menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purpose financial statements*) bagi pengguna eksternal.

Contoh pengguna eksternal adalah :

- a) Pemilik yang tidak terlibat langsung dalam pengelolaan usaha.
- b) Kreditur.
- c) Lembaga pemeringkat kredit.

Entitas yang memiliki akuntabilitas publik signifikan dapat menggunakan SAK ETAP jika otoritas berwenang membuat regulasi yang mengizinkan penggunaan SAK ETAP. Contohnya Bank Perkreditan Rakyat yang telah diijinkan oleh Bank Indonesia menggunakan SAK ETAP mulai 1 Januari 2010 sesuai dengan SE No. 11/37/DKBU tanggal 31 Desember 2009.

4. LAPORAN KEUANGAN MENURUT SAK ETAP

a. Elemen Laporan Keuangan Menurut SAK ETAP

SAK ETAP (2009) menjelaskan bahwa laporan keuangan suatu entitas terdiri dari :

1) Neraca

Neraca menyajikan aset, kewajiban dan ekuitas entitas pada suatu tanggal tertentu akhir pelaporan dan minimal mencakup pos-pos sebagai berikut :

- a) Kas dan setara kas
- b) Piutang usaha dan piutang lainnya
- c) Persediaan
- d) Properti investasi
- e) Aset tetap
- f) Aset tidak berwujud
- g) Utang usaha dan utang lainnya
- h) Aset dan kewajiban pajak
- i) Kewajiban diestimasi
- j) Ekuitas

SAK ETAP nomor 4 paragraf 4 menyatakan bahwa entitas harus menyajikan aset lancar dan aset tidak lancar, kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang, sebagai suatu klasifikasi yang terpisah dalam neraca, dimana klasifikasi tersebut adalah sebagai berikut :

a) Aset Lancar

SAK ETAP (2009 : 20) menyatakan bahwa entitas mengklasifikasikan aset sebagai aset lancar jika:

- (1) Diperkirakan akan direalisasi atau dimiliki untuk dijual atau digunakan, dalam jangka waktu siklus operasi normal entitas
- (2) Dimiliki untuk diperdagangkan
- (3) Diharapkan akan direalisasi dalam jangka waktu 12 bulan setelah akhir periode pelaporan; atau
- (4) Berupa kas atau setara kas, kecuali jika dibatasi penggunaannya dari pertukaran atau digunakan untuk menyelesaikan kewajiban setidaknya 12 bulan setelah akhir periode pelaporan.

b) Kewajiban Jangka Pendek

SAK ETAP (2009 : 20) menyatakan bahwa entitas mengklasifikasikan kewajiban sebagai kewajiban jangka pendek jika:

- (1) Diperkirakan akan diselesaikan dalam jangka waktu siklus normal operasi entitas
- (2) Dimiliki untuk diperdagangkan
- (3) Kewajiban akan diselesaikan dalam jangka waktu 12 bulan setelah akhir periode pelaporan; atau
- (4) Entitas tidak memiliki hak tanpa syarat untuk menunda penyelesaian kewajiban setidaknya 12 bulan setelah akhir periode pelaporan.

2) Laporan Laba Rugi

Laporan laba rugi memasukkan semua pos penghasilan dan beban yang diakui dalam suatu periode kecuali SAK ETAP mensyaratkan lain. SAK ETAP mengatur perlakuan berbeda terhadap dampak koreksi atas kesalahan dan perubahan kebijakan akuntansi yang disajikan sebagai penyesuaian terhadap periode yang lalu dan bukan sebagai bagian dari laba atau rugi dalam periode terjadinya perubahan (Ikatan Akuntan Indonesia, 2009 : 5.2). Laporan laba rugi minimal mencakup pos-pos sebagai berikut:

- a) Pendapatan
- b) Beban keuangan
- c) Bagian laba atau rugi dari investasi yang menggunakan metode ekuitas
- d) Beban pajak
- e) Laba atau rugi neto.

3) Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan perubahan ekuitas menyajikan laba atau rugi entitas untuk suatu periode, pos pendapatan dan beban yang diakui secara langsung dalam ekuitas untuk periode tersebut, pengaruh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan yang diakui dalam periode tersebut, dan jumlah investasi oleh, dan deviden dan distribusi lain ke pemilik ekuitas selama periode tersebut (Ikatan Akuntan Indonesia, 2009, 6.2).

4) Laporan Arus Kas

Laporan arus kas menyajikan informasi perubahan historis atau kas dan setara kas entitas, yang menunjukkan secara terpisah perubahan yang terjadi selama satu periode dari aktivitas operasi, investasi dan pendanaan (Ikatan Akuntan Indonesia, 2009, 7.1). Informasi yang disajikan di dalam laporan arus kas menurut SAK ETAP yakni sebagai berikut :

- a) Aktivitas Operasi
- b) Aktivitas Investasi
- c) Aktivitas Pendanaan

5) Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan berisi informasi sebagai tambahan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan catatan atas laporan keuangan memberikan penjelasan naratif atau rincian jumlah yang disajikan dalam laporan keuangan dan informasi pos-pos yang tidak memenuhi kriteria pengakuan dalam laporan keuangan (Ikatan Akuntan Indonesia, 2009, 8.1). Catatan atas laporan keuangan harus :

- a) Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi tertentu.
- b) Mengungkapkan informasi yang diisyaratkan dalam SAK ETAP tetapi tidak disajikan dalam laporan keuangan
- c) Membertikan informasi tambahan yang tidak disajikan dalam laporan keuangan, tetapi relevan untuk memahami laporan keuangan.

b. Unsur-unsur Laporan Keuangan Menurut SAK ETAP

Menurut SAK ETAP unsur-unsur laporan keuangan terdiri dari :

1) Aset

Aset adalah sumber daya yang dikuasai entitas sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan darimana manfaat ekonomi di masa depan diharapkan akan diperoleh entitas (SAK ETAP, 2009, 2.12).

Menurut Rosita (2013 : 6) aset adalah sumber daya yang dikuasai entitas sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dari mana manfaat ekonomi di masa depan akan diperoleh entitas.

2) Kewajiban

Kewajiban merupakan kewajiban masa kini entitas yang timbul dari peristiwa masa lalu, yang penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan arus keluar dari sumber daya entitas yang mengandung manfaat ekonomi (SAK ETAP, 2009, 2.12).

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2009, 2.17) karakteristik esensial dari kewajiban (*liability*) adalah bahwa entitas mempunyai kewajiban (*obligation*) masa kini untuk bertindak atau untuk melaksanakan sesuatu dengan cara tertentu. Kewajiban dapat berupa kewajiban hukum dan kewajiban konstruktif. Kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak mengikat atau peraturan perundangan.

3) Pendapatan

Pendapatan adalah penghasilan yang timbul dalam pelaksanaan aktivitas entitas yang biasa dan mengacu pada beberapa istilah seperti penjualan, imbalan, bunga, dividen, royalti dan sewa (SAK ETAP, 2009, 2.22).

4) Beban

Beban (*expens*) adalah penurunan manfaat ekonomi selama suatu periode pelaporan dalam bentuk arus kas keluar atau penurunan aset, atau terjadinya kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak terkait dengan distribusi kepada penanam modal (SAK ETAP, 2009, 2.20)

Pada SAK ETAP nomor 2 paragraf 23 menyatakan bahwa beban mencakup kerugian dan beban yang timbul dalam pelaksanaan aktivitas entitas yang biasa.

- a) Beban yang timbul dalam pelaksanaan aktivitas entitas yang biasa meliputi, misalnya, beban pokok penjualan, upah, dan penyusutan. Beban tersebut biasanya berbentuk arus keluar atau berkurangnya aset seperti kas dan setara kas, persediaan, dan aset tetap.
- b) Kerugian mencerminkan pos lain yang memenuhi definisi beban yang mungkin, atau mungkin tidak, timbul dari pelaksanaan aktivitas entitas yang biasa. Ketika kerugian diakui dalam laporan laba rugi, biasanya disajikan secara terpisah karena pengetahuan mengenai pos tersebut berguna untuk tujuan pengambilan keputusan ekonomi.

5) Ekuitas

Ekuitas adalah hak sisa pada set suatu entitas setelah dikurangi dengan seluruh kewajibannya. Ekuitas meliputi investasi pemilik entitas, ditambah dengan hasil atas investasi yang diperoleh melalui operasi yang menguntungkan dan hasil yang ditahan kembali untuk digunakan dalam operasi entitas tersebut, dikurangi dengan penurunan atas investasi pemilik sebagai akibat dari operasi yang tidak menguntungkan dan alokasi kepada pemilik (SAK ETAP, 2009, 2.19).

5. CONTOH LAPORAN KEUANGAN MENURUT SAK ETAP

Tabel 2.1 Laporan Neraca

Koperasi Karyawan Prima Tirta
PDAM Surya Sembada Kota Surabaya
Neraca Komperatif tahun 2015 dan 2014

Uraian	2015	2014	Uraian	2015	2014
Aktiva Lancar			Kewajiban Lancar		
Kas	3.035.965.298	2.859.298.182	Hutang pajak	73.053.355	1.248.769
Deposito	75.750.000	1.375.750.000	Hutang usaha	1.031.065	14.270.370
Piutang anggota	20.663.067.031	22.010.550.242	Simp. Sukarela	1.149.162.149	1.070.129.709
Penyisihan piutang	(42.846.768)	(11.550.000)	Jasa Anggota	-	-
Piutang non anggota	6.445.542	6.221.042	Dana-dana	2.625.518.506	2.478.709.939
Pendapatan	452.020.100	-	Dana bakti angg	1.048.663.319	1.049.663.319
Persediaan	99.022.667	119.213.042			
Uang muka	1.131.247	12.127.559			
JUMLAH	24.290.555.117	26.371.610.342	JUMLAH	5.222.102.623	4.613.131.375
Investasi jangka panjang			Kewajiban Tidak Lancar		
Simp. Pokok	8.525.000	8.525.000	Hutang jangka panjang	5.202.636.000	8.602.116.679
Simp. Wajib	7.325.000	7.325.000	Imbalan pasca kerja	130.636.000	100.000.000
Simp. Sukarela	1.149.162.149	1.070.129.709			
Penyertaan koperasi	17.050.000	14.300.000			
Aktiva Tetap			Ekuitas		
Gedung	-	-	Simp. Pokok	855.750.000	931.050.000
Perlengkapan	50.344.880	50.344.880	Simp. Wajib	7.396.136.950	7.102.182.950
Inventaris kantor	120.890.300	119.290.300	Cadangan	4.281.578.662	3.820.899.125
Mebelair	29.762.334	29.763.334	Donasi	89.309.125	89.309.125
Kendaraan	191.351.000	20.500.000	SHU	1.449.267.884	2.327.637.877
Akumulasi peny.	(200.372.902)	(202.280.984)			
Aset lain-lain	177.200.515	182.700.511			
JUMLAH	24.676.781.244	26.586.227.383	JUMLAH	24.676.781.244	26.586.227.383

Sumber : Wike (2016).

Tabel 2.2 Laporan perubahan ekuitas

Koperasi Karyawan Prima Tirta
PDAM Surya Sembada Kota Surabaya
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
PER : 31 DESEMBER 2016

No	URAIAN	2015
	Saldo awal kekayaan bersih	14.270.979.329
	Penambahan	
	Simpanan pokok	(75.300.000)
	Simpanan wajib	293.954.000
	Cadangan	460.679.285
	Modal donasi	-
	SHU setelah pajak	1.499.267.884
	Jumlah	2.178.601.169
	Pengurangan	
	SHU tahun lalu	2.327.537.877
	Jumlah	2.327.537.877
	Saldo akhir kekayaan bersih	14.122.042.621

Sumber : Wike (2016).

Tabel 2.3 Laporan laba rugi

Koperasi Karyawan Prima Tirta
PDAM Surya Sembada Kota Surabaya
Laporan Laba Rugi (SHU)

Uraian	2015	2014
Pendapatan		
Pendapatan Jasa dari anggota	3.474.372.443	5.559.578.871
Pendapatan Jasa dari Non anggota	1.089.549.950	887.060.940
Jumlah Pendapatan Jasa	4.563.922.393	6.446.639.811
BEBAN		
Beban pokok jasa anggota	571.229.872	1.963.783.978
Beban pokok jasa Non anggota	1.025.796.450	829.369.172
Beban ops. Beban usaha	854.765.650	789.515.400
Beban ops. Beban dan umum	372.729.797	350.408.792
Beban perkoperasian	110.551.565	106.370.850
Beban anggota	138.690.000	146.200.000
Jumlah beban	3.737.763.334	4.365.648.192
SHU BRUTO	1.490.159.058	2.260.991.619
Pendapatan lain-lain	54.748.050	
Pendapatan luar usaha	7.600.015	
SHU sebelum pajak	1.544.907.108	2.327.537.877
Beban pajak	45.639.224	-
SHU setelah pajak	1.499.267.844	2.327.537.877

Sumber : Wike (2016).

Tabel 2.4 Laporan Arus Kas

Koperasi Karyawan Prima Tirta PDAM Surya Sembada Kota Surabaya Laporan Arus Kas		
URAIAN	2015	2014
I. Arus kas dari aktivitas operasi		
SHU tahun berjalan	1.499.267.884	2.327.537.877
Penyusutan aset	(1.908.082)	7.831.982
SHU sebelum perubahan modal kerja	1.497.802	2.335.369.859
Perubahan piutang tak tertagih	31.296.768	-
Perubahan piutang non anggota	(204.500)	-
Perubahan pendapatan YMHD	(452.020.100)	-
Perubahan persediaan barang	20.190.650	-
Perubahan penyertaan koperasi	2.750.000	2.750.000
Perubahan hutang usaha	(13.239.305)	(90.617.675)
Perubahan simpanan anggota	79.032.440	144.150.207
Perubahan utang lain-lain	118.312.605	-
Perubahan utang jangka pendek	157.589.016	-
Perubahan dana-dana	146.808.587	2.061.248.223
Perubahan dan bakti anggota	1.048.662.319	-
Arus kas dari aktivitas operasi	5.366.803.387	501.832.225
II. Arus kas dari aktivitas investasi		
Perubahan penyertaan		
Penambahan aset tetap	(172.451.000)	(600.004)
Arus kas dari aktivitas investasi	(172.451.000)	(600.004)
III. Arus kas dari aktivitas pendanaan		
Perubahan imbalan kerja	30.000.000	-
Perubahan simpanan pokok	(75.300.000)	-
Perubahan simpanan wajib	293.954.000	-
Perubahan cadangan	460.679.285	-
Kenaikan (Penurunan) hutang jangka panjang	(3.399.480.679)	(1.579.082.416)
Kenaikan (Penurunan) saldo modal awal	(2.327.537.877)	1.573.473.387
Arus kas dari aktivitas pendanaan	(5.017.685.271)	(5.609.029)
(Kenaikan) Penurunan Kas dan Setara Kas	176.667.116	495.623.192
Kas dan Setara Kas Awal Periode	2.859.298.182	2.363.674.990
Kas dan Setara Kas Akhir Periode	3.035.965.298	2.859.298.182

Sumber : Sumber : Wike (2016).

B. PENELITIAN TERDAHULU

1. Nama : Djumiko, Adi Wiratno, Margani Pinasti (2013)

Judul : Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Koperasi Pasca Pencabutan PSAK 27 Tentang Akuntansi Koperasi (Studi Kasus Pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia Kabupaten Pemalang)

Hasil Penelitian : Ada tiga faktor yang mempengaruhi penerapan standar pelaporan keuangan koperasi pada KPRI Kabupaten Pemalang pasca pencabutan PSAK 27, yaitu :

- a) Penggunaan *software* akuntansi koperasi yang terintegrasi berpengaruh terhadap penyusunan laporan keuangan koperasi.
- b) Diklat tentang akuntansi koperasi yang diberikan oleh Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) Kabupaten Pemalang terhadap gerakan koperasi, turut menentukan bentuk dan jenis laporan keuangan dimasing-masing KPRI.
- c) Sosialisasi regulasi dari pemerintah terkait dengan pedoman atau standar pelaporan keuangan koperasi yang berlaku.

Terkait kemungkinan diterapkannya SAK ETAP dalam penyusunan laporan keuangan koperasi, seluruh KPRI yang menjadi sumber data menyatakan bahwa SAK ETAP dapat diterapkan sepanjang ada regulasi atau kebijakan dari pemerintah.

2. Nama : Rosita Dara Febry Kusmana (2013)

Judul : Penerapan SAK ETAP KPRI Serba Usaha Migas Cepu

Hasil Penelitian : KPRI Serba Usaha Migas Cepu belum menyajikan laporan keuangan sesuai yang diatur dalam SAK ETAP. Seperti pada laporan perubahan modal yang disajikan KPRI Serba Usaha Migas Cepu merupakan laporan perubahan modal kerja yang unsur-unsurnya tidak sama dengan laporan perubahan modal yang diatur dalam SAK ETAP, serta pada laporan hasil usaha yang dibuat oleh KPRI Serba Usaha Migas Cepu tidak diatur dalam SAK ETAP tetapi pelaporan perhitungan hasil usaha diatur dalam UU No 17 tahun 2012 tentang perkoperasian.

3. Nama : Tri Wahyuningsih (2014)

Judul : Uji Kepatuhan Penyusunan Laporan Keuangan Pada KPRI Warga Jaya Berdasarkan SAK ETAP

Hasil Penelitian : Terdapat ketidak sesuaian atau tidak patuh laporan keuangan yang disajikan KPRI Warga Jaya berdasarkan SAK ETAP yang diantaranya mengenai :

- a) Dalam perhitungan akumulasi penyusutan menghitungnya langsung dipersetahunkan tidak dihitung dari tanggal perolehan
- b) Adanya kerugian aset yang tidak dicantumkan pada laporan laba rugi
- c) Tidak adanya laporan perubahan ekuitas
- d) Tidak menyajikannya laporan arus kas
- e) Penggantian sub Judul Perhitungan Hasil Usaha menjadi Laba Rugi.

4. Nama : Dimas Andika Hertiyo, Nur Hisamuddin (2016)

Judul : Laporan Keuangan Koperasi Serba Usaha Buah Ketaksi Berbasis SAK ETAP

Hasil Penelitian : Laporan keuangan yang disusun oleh koperasi serba usaha Buah Ketaksi hingga saat ini adalah sebatas laporan perhitungan hasil usaha dan neraca. Tidak menyajikan laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan juga catatan atas laporan keuangan. Selain itu laporan keuangan yang telah disajikan koperasi serba usaha Buah Ketaksi masih belum sesuai dengan SAK ETAP

5. Nama : Raven Pardomuan, Siagian Sifrid S. (2016)

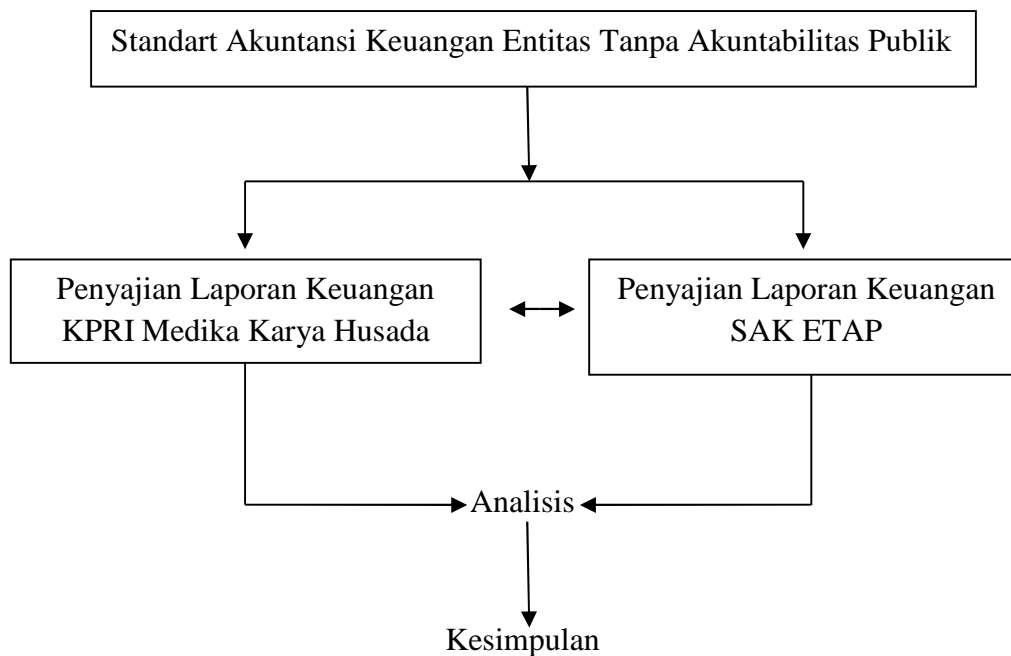
Judul : Analisis Penyajian Laporan Keuangan Berdasarkan Sak-Etap Pada Koperasi Karyawan Bank Sulut Go

Hasil Penelitian : Hasil analisis dari Koperasi Karyawan – PT. Bank Sulut Go mengenai penyajian laporan keuangan berdasarkan SAK ETAP dapat disimpulkan bahwa dalam penyajian laporan keuangan masih terdapat beberapa ketidaksesuaian dengan kaidah penyajian laporan keuangan menurut SAK ETAP. Adapun hal-hal yang membuat koperasi ini memiliki kekurangan dalam menyajikan laporan keuangannya berdasarkan SAK ETAP adalah karena minimnya pengetahuan mengenai SAK ETAP itu sendiri dan kurangnya kesadaran manajemen akan pentingnya laporan keuangan

Pada penelitian ini terdapat persamaan dengan penelitian sebelumnya, yaitu peneliti ingin meneliti bagaimana penyajian laporan keuangan koperasi terkait dengan diterbitkannya Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) karena peraturan ini merupakan standar penyusunan laporan keuangan terbaru.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya ialah penelitian ini mengaplikasikan pada obyek penelitian yang lain. Peneliti ini dilakukan pada KPRI Medika Karya Husada yang berada di instansi Rumah Sakit Umum Daerah Bangil. KPRI Medika Karya Husada di pegang atau dikelola oleh pegawai negeri sipil RSUD Bangil yang berlatar belakang non akuntansi. Bukan pengurus saja rata-rata anggota KPRI Medika Karya Husada saya kira merupakan orang yang belum mengetahui tentang ilmu akuntansi.

C. KERANGKA KONSEPTUAL



Gambar 2.1 : Kerangka konseptual penelitian
(Sumber : Diolah peneliti)

Penjelasan :

Penelitian ini berfokus pada penyajian laporan keuangan KPRI Medika Karya Husada untuk dijadikan penyajian laporan keuangan menurut Standart Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik.